

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  
DENGAN  
SEKRETARIS KABINET  
SELASA, 4 MEI 2010**

-----

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Sekretaris Kabinet  
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Mei 2010  
Pukul : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)  
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI  
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : **1. Masalah Lingkup Kewenangan Tugas Sekretaris Kabinet;  
2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, serta Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011;  
3. Masalah Aktual Lainnya.**  
Kehadiran : 29 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI  
21 orang izin

**HADIR :**

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH
- ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Muslim, SH
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Kasma Bouty, SE.,MM
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
- ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Mustokoweni Murdi, SH
- ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ◆ H.M Gamari Sutrisno
- ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM
- ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Mestariany Habie, SH
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

**IZIN :**

- ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si
- ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Dr. M. Idrus Marham
- ◆ Irvansyah, S.IP
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
- ◆ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ H. M. Izzul Islam
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kabinet dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

### • Sekretaris Kabinet

Pada saat pelantikan Sekretaris Kabinet tanggal 6 Januari 2010, Presiden memberikan arahan agar Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi *Cabinet Management*. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana kerja Sekretariat Kabinet tahun 2010 dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden, dirangkum dalam Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dengan sasaran:

- a. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- b. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum;
- c. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres;
- d. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyiapan bahan sidang kabinet;
- e. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pendistribusian hasil risalah sidang kabinet kepada peserta sidang;
- f. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintah dan kepangkatan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden;
- g. Terwujudnya peningkatan kecepatan aksesibilitas penyediaan informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*.

Sasaran direncanakan dapat dicapai melalui arah kebijakan:

- a. Penataan kembali tugas fungsi dan struktur organisasi serta prosedur kerja dalam rangka peningkatan kualitas pemberian saran kebijakan;
- b. Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas pemberian saran kebijakan dan aksesibilitas informasi kepada *stakeholders*;
- c. Peningkatan kompetensi dan *reassessment* penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengisian jabatan sesuai formasi dalam rangka peningkatan kualitas pemberian saran kebijakan;
- d. Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka peningkatan kualitas aksesibilitas informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*.

Strategi pencapaian sasaran adalah:

- a. Penataan kembali tugas fungsi dan struktur organisasi dengan prinsip bagi habis tugas berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pemberian dukungan kebijakan;
- b. Penyempurnaan prosedur kerja berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pemberian dukungan kebijakan;
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja untuk pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM), peningkatan kompetensi SDM dan kelembagaan serta tata laksana organisasi.

- **Dewan Pertimbangan Presiden**

Sehubungan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 sebagaimana diuraikan di atas, maka Sekretariat Kabinet tidak dalam kapasitas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pertimbangan Presiden.

- **Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)**

Dalam kedudukan UKP-PPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden, maka Sekretariat Kabinet tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja UKP-PPP. Namun begitu, antara Sekretariat Kabinet dan UKP-PPP terjalin hubungan kerjasama yang erat dan harmonis saling sinergi dalam melaksanakan tugas membantu Presiden dan Wakil Presiden.

- **Staf Khusus Presiden**

Mengenai Staf Khusus Presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dan Peraturan Presiden Nomor 43.A Tahun 2009. Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet. Staf Khusus Presiden mendapat dukungan administrasi dan keuangan dari Sekretariat Kabinet. Sekretaris Kabinet melakukan evaluasi terhadap kinerja Staf Khusus Presiden dan memberikan arahan-arahan perbaikan guna meningkatkan dukungan kepada Presiden.

- **Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009**

Pagu Definitif Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp50.000.000.000,-**, dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah alokasi anggaran dipotong **(3,9%)** menjadi **Rp48.050.000.000,-**. Pada tahun 2009 dilaksanakan remunerasi di Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam rangka reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan anggaran sebesar **Rp15.635.340.000,-**. Sehingga pagu anggaran Sekretariat Kabinet menjadi **Rp32.414.660.000,-**. Realisasi pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar **Rp21.481.170.558,-** atau **(66,27%)**

- **Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010**

Pagu Definitif Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp44.000.000.000,-**, Realisasi pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sampai dengan 30 April 2010 sebesar **Rp 6.518.097.925,- (15,43%)**.

- **RAPBN Tahun Anggaran 2011**

Pada Tahun Anggaran 2011 Sekretariat Kabinet memperoleh pagu Indikatif sebesar **Rp97.062.357.000,-**, Sekretariat Kabinet pada Tahun 2011 menetapkan 2 (dua) Program operasional yaitu Program Teknis dan Generik.

### **III. KESIMPULAN/PENUTUP**

Setelah Sekretaris Kabinet menyampaikan paparan dan menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI mendorong Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi **"cabinet management"** secara optimal agar lebih berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, mediasi, koordinasi program-program berbagai kementerian agar terjadi efisiensi dan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan di masing-masing sektor.
2. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Komisi II DPR RI meminta Sekretaris Kabinet memberi masukan untuk penyempurnaan politik Anggaran supaya pengelolaan dan penggunaan dana lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan di daerah.
3. Untuk meningkatkan keterbukaan dan kemudahan publik dalam memperoleh akses informasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi II DPR RI mendukung rencana Sekretaris Kabinet untuk pengembangan sistem informasi manajemen dan penataan kelembagaan. Dalam kaitan ini penguatan kualitas sumber daya manusia perlu diprioritaskan disamping pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan *website*.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Sekretaris Kabinet untuk mendorong Instansi terkait untuk menyelesaikan grand design tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menyelesaikan persyaratan lainnya sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut.
5. Komisi II DPR RI mendorong Sekretaris Kabinet agar berkoordinasi dengan Sekretaris Negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi serta peran yang dilakukan unit-unit kerja dilingkungan Lembaga Kepresidenan.

**Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB.**

**JAKARTA, 4 MEI 2010  
PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
KETUA,**

ttd

**H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH**  
**A-178**